PENANGGULANGAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT ADAT DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGER SEMERU

Hablana Rizka Achmadi

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Chandroid19@gmail.com

Emmilia Rusdiana

Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Taman nasional adalah kawasan konservasi yang relatif paling maju dalam sistem pengelolaan dibandingkan dengan taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam dan suaka margasatwa. Taman nasional dijadikan sebagai kawasan yang mampu mengantisipasi terjadinya perburuan dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi. Salah satu taman nasional yang terbesar di Jawa Timur adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat masyarakat Suku Tengger yang juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan konservasi, terutama berkaitan dengan hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penanggulangan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bentuk penanggulangan masyarakat Suku Tengger terhadap perburuan satwa yang dilindungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dengan pembinaan spiritual. Faktor pendukung dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi adalah aturan hukum dan budaya hukum yang telah dimiliki oleh Suku Tengger sejak dulu. Sehingga hukum adat yang diterapkan Suku Tengger lebih efektif daripada hukum nasional.

Kata kunci: Perburuan, Masyarakat Adat, TNBTS.

Abstract

The national park is a conservation area that is relatively the most advanced management systems compared with forest park, natural park, nature reserves and wildlife reserves. Serve as a national park area that is able to anticipate the hunt with efforts to prevent the extinction of protected animals. One of the largest national parks in East Java is the Bromo Tengger Semeru National Park. Around Bromo Tengger Semeru National Park there is people Tengger tribe which also has an important role in maintaining conservation areas, particularly with regard to customary law is applied in everyday life. So the purpose of this study was to determine the response form poaching is conducted by people around Bromo Tengger Semeru National Park and to determine the factors supporting tackling poaching protected animals in Bromo Tengger Semeru National Park. This type of research is a sociological study. Data collected through observation, interviews, and literature. The results showed the shape of society Tengger tribe countermeasures against poaching protected animals Bromo Tengger Semeru National Park is done with spiritual guidance. The supporting factors in the prevention of poaching of protected animals is the rule of law and legal culture that has been owned by the Tengger tribe long ago. So that customary law applied Tengger tribe is more effective than national law.

Keywords: Poaching, Culture, TNBTS.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup dan mempunyai fungsi masing-masing dalam

menyeimbangkan ekosistem yang telah terbentuk pada lingkungan tersebut. Hutan memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang

dimiliki bangsa Indonesia adalah karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu perlu dilestarikan, disyukuri, dilindungi dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan hutan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan kawasan hutan, hasil hutan, dan lingkungannya agar tercapai secara optimal dan lestari.¹

Ekosistem yang terbentuk memiliki kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban tiap generasi dalam upaya perlindungan pada satwa dan tumbuhan. Salah satu unsur ekosistem adalah satwa. Banyak satwa liar yang dieksploitasi oleh manusia. Di antara jenis satwa-satwa yang sering diburu seperti banteng, rusa, kijang, kancil, trenggiling, ular, biawak, tokek, biawak, murai batu, kepodang, kaccer, merak, jalak, lumba-lumba, hiu dan lain sebagainya. Jenis satwa tersebut sering diburu, sehingga yang terjadi adalah kepunahan pada satwa jenis tersebut dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut perlu dilindungi guna untuk menjaga keseimbangan ekosistem di masa mendatang.

Berdasarkan catatan organisasi PROFAUNA, di tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kasus perburuan satwa liar dilindungi di Jawa Timur. Ada 370 kasus perburuan, sedangkan di tahun 2014 tercatat tidak sampai 100 kasus perburuan satwa liar dilindungi. Adapun jenis satwa yang masuk daftar ancaman kepunahan lokal, seperti: kucing hutan, lutung jawa, elang jawa, dan kukang jawa.² Hal yang disayangkan dari kasus perburuan tersebut adalah perburuan terjadi di kawasan konservasi alam yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi satwa yang dilindungi.

Di Indonesia, Taman nasional adalah salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Taman nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar

alam. Departemen kehutanan juga berencana mengembangkan 21 Taman Nasional model dan meningkatkan status sebagian balai taman nasional menjadi balai besar taman nasional. Taman nasional sebagai kawasan yang dianggap mampu untuk mengantisipasi terjadinya perburuan liar dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan satwa yang dilindungi.

Lutung jawa merupakan satwa endemik Indonesia yang hanya dapat dijumpai di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Pulau Sempu, dan Nusa Barung.³ Keberadaan lutung jawa masih tersisa 8 titik habitat aslinya di Jawa Timur yakni di gunung Semeru sisi bawah, Coban Kelurahan Paranglejo, Kecamatan Dau, Hutan Cagar bagian bawah, Cemoro Kandang Gunung Kawi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Meru Betiri.⁴ Populasi lutung yang terus menurun akibat perburuan, maka perlu adanya kegiatan konservasi untuk menyelamatkan keberadaan lutung.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik antara lain terdapat lautan pasir pada ketinggian 2.050 mdpl dan terdapat beberapa danau pada ketinggian 2.300 mdpl, danau tersebut antara lain adalah danau ranu pani.⁵ Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat sekitar 137 jenis burung, 22 jenis mamalia dan 4 jenis reptil. Satwa langka dan dilindungi yang terdapat di taman nasional ini antara lain luwak (*pardofelis marmorata*), rusa (*cervus timorensis*), kera ekor panjang (*macaca fascicularis*), kijang (*muntiacus muntjak*), ayam hutan merah (*gallus gallus*), macan tutul (*panthera pardus*), ajag (*cuon alpinus*), dan berbagai jenis burung seperti alap-alap burung (*accipiter virgatus*), rangkong (*buceros rhinoceros silvestris*), elang ular bido (*spilornis cheela bido*) srigunting hitam (*dicrurus macrocercus*), elang

¹ Departemen kehutanan, Dirjend Perlindungan Hutan dan konservasi alam, petunjuk teknis jabatan polisi kehutanan, hal.68

² Suara surabaya

³ Suara Merdeka

⁴ <http://www.scribd.com/doc/221860220/Makalah-Satwa-Liar#scribd> diakses pada 11 November 2015.

⁵ Kementerian Kehutanan Japan International Cooperation Agency.

http://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/008/materials/pdf/leaflet_02.pdf diakses 12 November 2015

bondol (*haliastur indus*), belibis yang hidup di ranu pani, ranu regulo, dan ranu kumbolo.⁶

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selain sebagai kawasan wisata, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga memiliki nilai-nilai kebudayaan. Karena masyarakat sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki peranan dalam menjaga kawasan konservasi. Adapun masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Bromo sebagian besar adalah masyarakat Suku Tengger. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan tindakan masyarakat Suku Tengger diatur oleh ketentuan adat berupa aturan-aturan adat dan hukum adat yang berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat. Hukum adat adalah hukumnya masyarakat yang lahir dari akar budaya lisan (bertutur) berbentuk tidak tertulis. Salah satu aturan atau hukum adat yang harus ditaati masyarakat Suku Tengger yaitu tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang (kecuali untuk korban dan dimakan).⁷ Hukum adat ini tentu memiliki tujuan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar Tengger. Namun berdasarkan kejadian lapangan telah terjadi pertentangan, yaitu maraknya kasus perburuan di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan hasil putusan mahkamah agung pada tanggal 30 Juni 2014 terdapat 2 pelaku perburuan satwa yang tertangkap. Kedua pelaku tersebut merupakan warga Lumajang sekitar Bromo Tengger Semeru. Kedua pelaku tersebut tertangkap dengan membawa peralatan untuk menangkap burung berupa 2 buah jaring ijuk warna hijau dengan ukuran masing-masing panjang 5 meter dan lebar 1,5 meter, 1 buah sangkar yang terbuat dari kayu, 2 buah plastik kecil warna putih, 2 bilah sabit, 4 bumbung warna putih yang terbuat dari paralon, seutas tali/tampar kecil warna coklat dengan panjang 3 meter pergi ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.⁸ Begitu pula pada 14 September 2014 seorang pelaku perburuan yang juga merupakan warga Malang yang ada di sekitar Bromo Tengger Semeru. Pelaku tersebut diamankan oleh petugas penjaga hutan dan disita

barang bukti berupa 1 buah senapan angin, 1 ekor burung punggur jail, 1 ekor burung cucak wilis, dan 2 ekor burung jenis manten yang sudah dalam keadaan mati.⁹

Berdasarkan kasus di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan hukum adat masyarakat Tengger dalam penanggulangan kasus perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena masyarakat Tengger telah memiliki hukum adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dalam mendukung pelestarian lingkungan dan ekosistem. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penanggulangan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat adat sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yakni merupakan penelitian yang menggabungkan dua unsur penelitian hukum, dimana pada penelitian hukum yuridis atau normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum adat masyarakat Tengger diterapkan termasuk proses penanggulangan dalam kasus perburuan satwa yang dilindungi.

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan masyarakat sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Peneliti tertarik untuk meneliti hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Tengger dalam menjaga lingkungan konservasi yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Tengger yang masih menerapkan hukum adat dan bertempat tinggal di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena dalam penelitian kualitatif, objek penelitian¹¹ adalah situasi sosial yang terdiri tiga elemen, yaitu

⁶<http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000010398433/taman-nasional-bromo-tengger-semeru/1> diakses 10 November 2015

⁷ Noor M. Aziz. 2011. *Laporan Akhir Tim Pemantauan dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Negara*.

⁸ putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/260_Pid.Sus_2014_PN.Lmj.pdf diakses 11 November 2015

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajagrafindoPersada, 2004.

¹¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014. Hal.29.

tempat (*place*), pelaku (*person*), dan aktivitas (*activity*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tanpa ada modifikasi. Data primer berupa hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat sekitar Bromo Tengger Semeru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan lapangan, maka teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi adalah teknik analisis triangulasi. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan berhubungan dari berbagai pandangan.¹² Sehingga untuk mengecek keabsahan data penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber, metode, dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Perburuan Satwa yang Dilindungi

Potensi fauna yang terdapat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru relatif kecil baik jumlah jenis maupun kerapatannya. Dari 15 jenis mamalia yang dilindungi antara lain:¹³ *Manis Javanica*, *Panthera pardus*, *Hystryx branchyura*, *Laricus sp.*, dan Kijang (*Muntiacus muntjak*), dll. Sedangkan kelas aves yang dilindungi undang-undang antara lain adalah elang Jawa (*Spezaetus bartelsi*), Elang Bondol (*Haliastur indus*) *Falco maucensis*, *Pavo muticus*, *Halcyon cyanopentris*, *Pericroctus miniatus*, dan *Parus mayor*.

Kasus perburuan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih sering terjadi di setiap tahunnya. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat perburuan satwa di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tabel 1. Perburuan Satwa 2009-2013

No.	Tahun	Perburuan Satwa Buru		Keterangan	
		Hasil Buruan	Jenis Alat		
1.	2009	9 ekor burung	2 jaring	4 orang	
		1 ekor babi hutan	-	-	
2.	2010	-	-	-	
3.	2011	7 ekor burung	2 jaring	1 orang vonis 8 bln	
4.	2012	33 ekor burung	3 rol jaring	Melarikan diri	
5.	2013	4 ekor burung	1 senjata angin	Dilakukan pembinaan oleh TNBTS	
6.	2014	4 ekor burung	2 jaring dan 1 senjata angin	3 orang	

PEMBAHASAN

Bentuk Penanggulangan Perburuan Satwa Yang Dilindungi

Hukum adat masyarakat Tengger sangat kuat, meskipun begitu masyarakat hukum adat Tengger bersifat terbuka yakni mengikuti perkembangan zaman. Hukum adat dan hukum Negara berjalan beriringan, sehingga masyarakat hukum adat Tengger selalu mematuhi hukum-hukum Negara. Bentuk hukum adat di Tengger adalah tidak tertulis. Walaupun bentuk hukum tidak tertulis, jika terdapat pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam bermasyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Alat kontrol sosial selain hukum antara lain agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, dan keteladanan pemimpin. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Tengger yang menjadikan hukum adat

¹² Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

¹³ *Ibid.*

sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat.

Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat hukum adat yang merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Di dalam masyarakat adat terdapat aturan-aturan normatif, rumusan-rumusan dalam bentuk peribahasa atau asas-asas hukum yang tidak tertulis. Walaupun asas-asas hukum tersebut tidak tertulis, tetap ada penerapan sanksi maupun paksaan terhadap pelanggaran aturan-aturan normatif.

Masyarakat Tengger terdiri atas kelompok-kelompok desa yang masing-masing kelompok tersebut dipimpin oleh tetua. Dan seluruh perkampungan dipimpin oleh seorang kepala adat. Kepala adat atau dukun memiliki fungsi spiritual dan fungsi social. Fungsi spiritual dukun adat yaitu memimpin upacara adat. Sedangkan fungsi sosialnya adalah memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial yang diberikan kepada pelaku pelanggar hukum adat.

Sesuai hasil wawancara yang didapat, penerapan sanksi merupakan wujud penegakan hukum yang diterapkan oleh masyarakat Tengger. Penegakan hukum yang diterapkan pada masyarakat Tengger cenderung pada tindakan preventif. Tindakan preventif diterapkan karena masyarakat Tengger sangat kental dengan *magisc religious*. Sehingga masyarakat Tengger percaya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat imbalan dan hukuman dari Tuhan langsung. Metode yang digunakan dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi oleh masyarakat Tengger dilakukan dengan metode moralistik, yaitu pelaku perburuan akan dinasehati dan dibina dengan mental spiritual supaya sadar menjadi lebih baik. Seperti yang diungkapkan pada hasil penelitian, pelaku perburuan diberi sanksi yang sifatnya mendidik yaitu diperintahkan untuk beternak kuda, membersihkan tempat peribadatan (danyang), pelaku diruwat, bahkan pelaku diumumkan ramai-ramai di kampung. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian diri pelaku secara spiritual menurut Suku Tengger.

Jika pelaku perburuan satwa yang dilindungi bukan merupakan penduduk Suku Tengger maka penanggulangan tersebut langsung diserahkan

kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Adapun bentuk penanggulangan atas suatu permasalahan dilakukan secara bertahap, seperti sebagai berikut : (a) penanggulangan dilakukan oleh dukun pandhita atau ki petinggi, dalam penanggulangan masalah dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dengan memberikan nasehat atau petuah akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Bagi masyarakat Tengger asli hal ini tentu dapat diterima, sebab mereka paham bahwa menyakiti atau membunuh hewan tidak sesuai kebutuhan adalah larangan atau wewaton; (b) penanggulangan dilakukan oleh kepala desa atau petinggi. Kepala desa atau petinggi berfungsi sebagai penanggungjawab atas kewenangannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, sehingga ia juga melakukan pembinaan atas ketentraman dan ketertiban di desa. Sehingga jika permasalahan yang ditimbulkan merupakan masalah perburuan satwa yang dilindungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maka kepala desa dapat bekerja sama dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; (c) penanggulangan dilakukan oleh kepolisian sektor (Polsek). Penanggulangan ini dilakukan jika penanggulangan dengan dukun pandhita atau dengan kepala desa tidak dapat terselesaikan. Pada tingkat penanggulangan ini sudah masuk dalam ranah hukum pidana.

Upaya penanggulangan kasus perburuan satwa yang dilindungi di masyarakat Suku Tengger lebih menitikberatkan untuk menyadarkan pelaku maupun warga yang terlibat sehingga kasus dapat terselesaikan melalui musyawarah yang dihadiri oleh pemangku adat, pelaku dan warga yang terlibat.

Faktor Pendukung Dalam Penanggulangan Perburuan Satwa Yang Dilindungi

Secara teori upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua yaitu dengan usaha yang bersifat pidana atau represif dan melalui usaha yang bersifat nonpidana atau preventif. Hukuman berat tidak akan mengurangi tingkat kejahatan. Hal yang harus dicari dan ditanggulangi adalah penyebab dilakukannya kejahatan tersebut. Untuk itu, dalam penanggulangan kasus perburuan satwa liar tidak harus langsung diberi hukuman pidana. Hukuman yang bersifat preventif merupakan langkah kecil yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perburuan satwa yang dilindungi.

Penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi pada masyarakat Tengger hanya dapat memberikan nasehat atau petuah akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Bagi masyarakat Tengger asli hal ini tentu dapat diterima, sebab mereka paham bahwa menyakiti atau membunuh hewan tidak sesuai kebutuhan adalah larangan atau wewaton. Suku Tengger masih memiliki nilai-nilai kearifan ekologis yang tertanam secara turun temurun. Nilai kearifan ekologis menjadi kekuatan budaya, mereka memiliki struktur lingkungan tentang bagaimana hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dengan lingkungan.

Nilai kearifan ekologis yang dimiliki oleh masyarakat suku Tengger ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesika Liuw¹⁴ bahwa pelaku kejahatan penganiaya hewan, sebenarnya merupakan pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap hewan langka/hewan lindung itu hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya sebagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa kendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam.

Penetapan kawasan Bromo-Tengger-Semeru menjadi taman nasional bermakna bahwa kondisi yang telah ada akan dilindungi dan dikembangkan agar lebih semarak dan menarik. Tengger sebagai daerah penyangga juga bermakna bahwa budaya masyarakat Tengger perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi lebih sempurna, terutama adat istiadat dan nilai-nilai budayanya yang relevan dengan kemajuan zaman, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara.¹⁵

Masyarakat Tengger masih menjunjung nilai persamaan, demokrasi, dan kehidupan masyarakat, sosok seorang pemimpin spiritual seperti dukun lebih disegani pemimpin administrative. Karena masyarakat Tengger mempunyai hukum sendiri di luar hukum formal yang berlaku di Indonesia. Bagi Suku Tengger hukum adat Tengger sudah dapat mengatur dan mengendalikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, hukum adat yang telah dijalankan oleh masyarakat Suku Tengger lebih efektif daripada hukum nasional. Masyarakat Tengger lebih patuh dengan kaidah-kaidah hukum adat. Karena Suku Tengger memiliki kepercayaan tentang karma pahala, yaitu hidup atau nasib manusia tergantung dari pahalanya.

Hubungan antara masyarakat Tengger dengan taman nasional sangat erat karena daerah Bromo-Tengger-Semeru sebagian besar dihuni oleh masyarakat Tengger. Apabila kondisi alamnya akan dikembangkan menjadi taman nasional maka masyarakat sekitarnya pun dituntut untuk mampu menyelamatkan, memelihara dan ikut mengembangkannya. Apabila masyarakat Tengger tidak diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan dari taman nasional itu, tidak mustahil akan terjadi sikap masa bodoh terhadapnya, tidak ikut menjaga ataupun menyelamatkannya. Masyarakat Tengger sebagai penyangga, sudah tentu berperan besar untuk menjaga kelestarian taman nasional. Demi kelestarian taman nasional itu, masyarakat Tengger diharapkan merasa ikut memiliki (*handarbeni*), membina (*hamengkoni*) dan sekaligus dapat memanfaatkannya.¹⁶

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka masyarakat Suku Tengger sangat mendukung dalam melestarikan lingkungan alam. Diantara faktor pendukung dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi: (a) aturan hukum, masyarakat Suku Tengger memiliki struktur kelembagaan, yaitu lembaga pemuka agama dan lembaga dukun adat. Lembaga dukun adat bertugas mengawasi pelaksanaan aturan-aturan adat dan hukum adat. Lembaga dukun adat terdiri dari dukun adat legen, sanggar, dan sesepuh. Dengan adanya lembaga dukun adat maka terjadi koordinasi dengan lembaga bidang konservasi untuk menjaga lingkungan alam. Masyarakat menyambut dengan baik jika terdapat kerja sama dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam menanggulangi perburuan satwa yang dilindungi; (b) budaya hukum, nilai kearifan ekologis masih dimiliki masyarakat Tengger sehingga masyarakat Suku Tengger menjadikan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial. Adapun penanggulangan kasus perburuan satwa yang dilindungi

¹⁴ Yesika Liuw, *Op.cit.* Hal.6.

¹⁵ Noor M. Aziz, *Op.cit.* hal.7.

¹⁶ *Ibid.* hal.8.

dipecahkan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku cenderung bersifat menyadarkan. Sehingga hukum adat yang berlaku di Suku Tengger lebih efektif daripada hukum nasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian sebagai berikut : (1) Bentuk penanggulangan masyarakat Suku Tengger terhadap perburuan satwa yang dilindungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dengan metode moralistik. Metode moralistik merupakan metode yang bersifat mencegah. Metode ini diterapkan karena masyarakat Suku Tengger memiliki corak hukum adat yang *magisch religious*. Adapun langkah-langkah penanggulangan kasus perburuan satwa yang dilindungi dilaksanakan dengan cara bertahap. Pertama penanggulangan dilakukan oleh dukun pandhita atau ki petinggi, kedua, jika masih belum terselesaikan, maka penanggulangan dilakukan oleh kepala desa atau petinggi. Ketiga, penanggulangan dilakukan oleh kepolisian sektor; (2) Masyarakat Suku Tengger menerapkan hukum sendiri, hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Tengger lebih efektif dari pada hukum nasional. hukum adat Suku Tengger telah mendukung dalam melestarikan konsevasi lingkungan. Karena di dalam tata kelola masyarakat Suku Tengger terdapat lembaga dukun adat yang sangat antusias dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di masyarakat Tengger dalam penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi sudah efektif, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di tempat-tempat atau pos-pos Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang rawan terjadinya kasus perburuan satwa yang dilindungi.; (b) untuk mahasiswa supaya lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam mencegah terjadinya kasus perburuan satwa yang dilindungi; (c) untuk masyarakat Suku Tengger yang tinggal di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru supaya

lebih bijaksana dalam memberikan sanksi terhadap warga Suku Tengger yang melakukan perburuan satwa dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andi Prastowo. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anonim. 2012. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perburuan Satwa di Balai Taman Nasional Alas Purwo*. Skripsi, tidak diterbitkan. Jember: PPs Universitas Jember.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Departemen Kehutanan. Tanpa Tahun. *Petunjuk Teknis Jabatan Polisi Kehutanan*. Direktorat Jendral Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Herbert B. P. Aritonang. 2010. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindakan Pidana Perambahan hutan di Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat timur laut Provinsi Sumatera Utara*. Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: PPs UNS.
- Hilman Hadikusumo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- <http://www.scribd.com/doc/221860220/Makalah-Satwa-Liar#scribd> diakses pada 11 November 2015.
- <http://www.kaskus.co.id/thread/00000000000000010398433/taman-nasional-bromo-tengger-semeru/1> diakses 10 November 2015
- Jawahir Thontowi. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi

- Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya". *Pandecta* Vol.10 (1). (online) <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> diakses 2 Maret 2016 1:21
- M. Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajagrafindoPersada.
- Marhaeni Ria Siombo. 2011. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum* No.3 Vol 18. (online) <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/11%20Marhaeni%20RS.pdf> diakses 27 Februari 2016.
- Moleong J Lexy. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Mustakim. 2013. "Peran Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap Kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur." *AntroUnairDotNet*, Vol 2/ No.1/ Jan-Pebruari 2013. (online) <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Mustakim.pdf> diakses 6 November 2015.
- Noor M. Aziz. 2011. *Laporan Akhir Tim Pemantauan dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (online) [http://www.bphn.go.id/data/documents/pemantauan dan inventarisasi perkembangan hukum adat.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/pemantauan%20dan%20inventarisasi%20perkembangan%20hukum%20adat.pdf) diakses 29 Januari 2016.
- putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/download/pdf/260_Pid.Sus_2014_PN.Lmj.pdf diakses 11 November 2015
- Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan. Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Cetakan Pertama. Malang: UIN Malang Press.
- Soedarmadji. tanpa tahun. *Teknik Pembuatan Putusan Pengadilan dalam Perkara Satwa yang dilindungi: Suatu Gagasan Singkat dalam Wacana Teori dan Praktik*.
- Soejono Soekanto. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajawali.
- Suara Merdeka, (online) <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lutung-jawa-terancam-punah/> diakses 6 November 2015.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukari. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Tengger Pasuruan Jawa Timur*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Tubagus Unu Nitibaskara. 2005. *Dilema Dikotomi Konservasi dan Pemanfaatan*, Cetakan Pertama. Bogor: Pusat Studi Lingkungan UNB.
- Yesika Liuw. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990". *Lex Crimen* Vol. IV (3).